



IMPLEMENTASI MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LOMBOK TENGAH

Samsul Rizal¹, Muhammad Ridwan Habibi²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Institut Pendidikan Nusantara Global

*Corresponds email: sammastur@gmail.com

ABSTAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui model manajemen berbasis sekolah yang diterapkan dan bagaimana implementasi MBS di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah. Penelitian berjenis kualitatif dengan paradigma induktif. Data diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari Kepala Sekolah; Wakil Kepala Sekolah, Guru Senior serta Stakeholder terkait. Data kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi data. Data dikuatkan melalui hasil dokumentasi dan observasi partisipan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelola dalam mendefinisikan visi, terhubung dengan profesional lain untuk belajar tentang proses implementasi MBS. Sistem kritikal mencakup aspek administrasi interaksi-sosial, keterampilan teknis, motivasi peserta didik, ketersediaan waktu hingga masalah teknis lainnya. Faktor elementer sekaligus fundamental adalah gaya kepemimpinan transformasional dan konsep school based management. Selain itu pelaksanaan MBS pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah adalah pemantapan sistem, pola kerja, sehingga masyarakat sekolah mampu menentukan tujuan karir, menyusun dan melaksanakan rencana untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan, dan pengembangan sebagai seorang profesional yang inovatif..

Kata kunci : *Desentralisasi Pendidikan; Manajemen Berbasis Sekolah; Otonomi Pendidikan; Sekolah Efektif*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1998 sampai sekarang, era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi dewasa ini adalah perubahan pada

manajemen negara/pemerintahan, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsekuensi logis dari kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat diubah menjadi manajemen berbasis sekolah (MBS).

Bangsa yang berbudaya tinggi bergantung pada sistem pendidikan dan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kegiatan fundamental manusia benar-benar memerlukan upaya pengelolaan terencana, terarah, terorganisir dan terpadu (Sinuany-Stern & Hirsh, 2021). Hal itu penting dilakukan karena pendidikan merupakan kegiatan yang berorientasi masa depan (future oriented) dan menyangkut pembinaan potensi manusia baik secara pribadi maupun masyarakat dan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat (Fathurrochman, 2019; Fullan, 2012)

Salah satu komponen atau bagian terpenting dari institusi sekolah adalah siswa itu sendiri. Mendisiplinkan siswa adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Padahal faktor kedisiplinan sangatlah penting dalam berlangsungnya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Bertolak dari hal tersebut maka pihak sekolah dengan kewenangan yang dipunyainya membuat suatu aturan yang mengatur tentang kedisiplinan siswanya yang berorientasi kepada sistem angka kredit prestasi dan pelanggaran. Tentunya aturan ini tidak akan bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku di negara kita ini (Hamid, 2013)

Atas dasar ini pengelolaan organisasi pendidikan tidak boleh serampangan karena kehadiran organisasi pendidikan merupakan tuntutan modernisasi dan kemajuan sains dan teknologi untuk mengoptimalkan potensi pribadi sesuai karakter budaya bangsa. Kelangsungan hidup (survival) bangsa Indonesia sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan pembinaan dalam keluarga, sekolah dan luar sekolah (Fauzi, 2020; Sinclair, 2004).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana model dan bentuk implementasi manajemen berbasis sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari adalah data yang akan memberikan dan melukiskan realitas sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial konkrit (Bungin, 2019; Huberman & Miles, 2002). Situasi sosial yang sesuai konteks dilukiskan sampai pada penemuan makna perilaku para aktor yaitu kepala sekolah. Selanjutnya

dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami makna perilaku kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah.

Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden. Penelitian ini menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data, sedangkan data dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka sehingga menghasilkan analisis berupa uraian. Situasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah situasi dan perlakuan aktifitas implementasi model MBS pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah yang mencakup konteks yang luas, melibatkan pelaku yang banyak, waktu yang lama, lokasi yang berbeda dan proses yang bervariasi. Di dalam latar sosial inilah akan ditemukan berbagai informasi yang bersumber dari subjek penelitian yang diteliti. Penentuan sumber informasi dalam penelitian ini berpegang pada empat parameter yang dianjurkan yaitu: konteks (suasana, keadaan atau latar), perilaku, peristiwa dan proses. Untuk itu sebelum memasuki lapangan untuk memulai penelitian peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Disamping itu harus mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental.

PEMBAHASAN

Dengan MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumberdaya pendukungnya cukup di bicarakan di dalam sekolah dan masyarakatnya, sehingga tidak perlu di angkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi ke tingkat pusat yang belum efektif. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah (Sumintono, 2006). Kebijakan desentralisasi juga menjadi konsesus pengelola pendidikan agar lebih partisipatif dan aktif kreatif dalam pengembangan lembaga pendidikan (Fiske, 2018).

MBS dipandang sebagai alternative dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar kepala sekolah, guru, murid dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut: (a) Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. (b) Member peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. (c) Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. (d) Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. (e) Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan

biaya program-program sekolah. (f) Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi tiap sekolah yang lebih siap untuk menerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Efektivitas pengelola dalam mendefinisikan visi, terhubung dengan profesional lain untuk belajar tentang proses implementasi MBS. Sistem kritikal mencakup aspek administrasi interaksi-sosial, keterampilan teknis, motivasi peserta didik, ketersediaan waktu hingga masalah teknis lainnya. Faktor elementer sekaligus fundamental adalah gaya kepemimpinan transformasional dan konsep school based management. Selain itu pelaksanaan MBS pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lombok Tengah adalah pemantapan sistem, pola kerja, sehingga masyarakat madrasah mampu menentukan tujuan karir, menyusun dan melaksanakan rencana untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan, dan pengembangan sebagai seorang profesional yang inovatif

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2020). Strategi Pengembangan Madrasah Model. In *MENATAP WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA DI ERA 4.0: A Book Chapter of Indonesian Lecturer Associations*. Desanta Publisher.
- Arar, K., & Nasra, M. A. (2020). *Linking School-Based Management and School Effectiveness: The Influence of Self-Based Management, Motivation and Effectiveness in the Arab Education System in Israel*. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(1), 186–204. <https://doi.org/10.1177/1741143218775428>.
- Suci, E. R., & Widodo, A. (2021). Implementasi Model Manajemen Berbasis Sekolah pada MTs Swasta Al-Mushlihina Kota Binjai. *Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, 5(2), 189-202.
- Hamid, H. (2013). Manajemen Berbasis Sekolah. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), 87-96.
- Carrillo, C., & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and Teacher Education: a Literature Review of Online Teaching and Learning Practices. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 466–487. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184>
- Fathurrochman, I. (2019). Revitalization of Islamic Boarding School Management to Foster the Spirit of Islamic Moderation in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(August), 239–258. <https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82>.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.

Fiske, E. B. (2018). *Decentralization of Education: Politics and Consensus*. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 7(6). <https://doi.org/10.21275/ART20181749>